



## TAN JIN SING DAN KOMUNITAS TIONGHOA DI YOGYAKARTA AWAL ABAD KE-19

Rifai Shodiq Fathoni <sup>1</sup>, Nanang Setiawan <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, <sup>2</sup>Universitas Negeri Yogyakarta,

DOI: 10.22437/js.v4i1.30809

e-mail penulis: [nanangsetiawan@uny.ac.id](mailto:nanangsetiawan@uny.ac.id)

Naskah diterima: 27/12/2023, Naskah direvisi: 14/05/2024 Naskah disetujui: 15/06/2024

### ABSTRACT

*This research aims to identify Tan Jin Sing's role in determining the direction of Chinese-Javanese relations in Yogyakarta. The historiography of the Yogyakarta Sultanate has been dominated by narratives that describe the roles of Javanese nobles, while the Chinese community only receives a minimal portion of the historiography. This research is expected to add historical narrative regarding socio-political relations between the Chinese community and the Sultanate Yogyakarta more depth. This research uses the historical method, which includes heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, focusing on Tan Jin Sing and the Chinese community in Yogyakarta in the early 19th century. The results of this research show that the conflict between Sultan Sepuh and Crown Prince Raden Mas Surojo was a way for the figure Tan Jin Sing to enter the political realm of the Yogyakarta Sultanate. Tan Jin Sing's involvement in the political turmoil, had its own consequences. On the one hand, the conflict benefited the Chinese community in Yogyakarta as their economic and political position became more prominent. However, on the other hand, it triggered social jealousy which led to anti-Chinese sentiment among the public.*

*Keywords: Politics, Tan Jin Sing, Chinese Community, Sultanate of Yogyakarta.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Tan Jin Sing dalam menentukan arah hubungan Tionghoa-Jawa di Yogyakarta. Selama ini, historiografi Kesultanan Yogyakarta didominasi oleh narasi yang menjelaskan sepak terjang para bangsawan Jawa, akan tetapi komunitas Tionghoa hanya mendapatkan porsi minim. Penelitian ini diharapkan mampu menambah narasi sejarah mengenai hubungan sosial-politik antara komunitas Tionghoa dengan Kesultanan Yogyakarta secara lebih mendalam. Metode sejarah digunakan, meliputi tahap heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan berfokus pada Tan Jin Sing serta komunitas Tionghoa di Yogyakarta pada awal abad ke-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antara Sultan Sepuh dengan Putra Mahkota Raden Mas Surojo, menjadi jalan masuknya tokoh Tan Jin Sing ke ranah politik Kesultanan Yogyakarta. Keterlibatan Tan Jin Sing dalam gejolak politik tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri. Konflik ini di satu sisi menguntungkan komunitas Tionghoa di Yogyakarta, karena posisi mereka di bidang ekonomi dan politik semakin diperhitungkan. Namun, di sisi lain memicu terjadinya kecemburuan sosial yang berujung pada sentimen anti-Tionghoa di kalangan masyarakat.

**Kata kunci:** Politik, Tan Jin Sing, Komunitas Tionghoa, Kesultanan Yogyakarta.

## PENDAHULUAN

Secara garis besar keberadaan komunitas Tionghoa telah lama menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Mulai dari masa prakolonial hingga kemerdekaan, kelompok ini terus ada dan berkembang. Dalam sejarah Nusantara, komunitas Tionghoa sulit dipisahkan dari perannya dalam perputaran roda ekonomi. Raffles dalam *History of Java* (1817), menyebut etnis ini sebagai *the life and soul of the commerce of the country*. Posisi mereka dalam perdagangan perantara sulit disaingi bahkan oleh orang Eropa sekalipun.<sup>1</sup>

Dewasa ini orang-orang Tionghoa di Indonesia memang dianggap kuat secara ekonomi, tetapi mereka tetap rentan secara politik. Di beberapa tempat, menjadi penduduk Indonesia dengan label Cina bisa beresiko. Bila berkaca pada sejarah Indonesia, orang Tionghoa bisa dikatakan sebagai kelompok yang rentan terhadap pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Mereka sering kali disalahkan sebagai penyebab kesenjangan ekonomi dan sosial. Bahkan, pemerintah yang gagal menyalurkan kesejahteraan secara merata, sering menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam bila terjadi krisis ekonomi.

Kerusuhan Mei 1998 bisa dikatakan sebagai tragedi paling mengerikan yang menimpa kelompok ini sejak kemerdekaan. Mereka tidak hanya mengalami kerugian secara materil, tetapi juga penganiayaan secara fisik. Selama kerusuhan ini berlangsung, pemerkosaan massal yang terjadi secara sistematis digunakan sebagai salah satu sarana kekerasan.<sup>2</sup> Tujuan dari rentetan kekerasan tersebut adalah memaksa orang Tionghoa pergi dan menyerahkan kekayaannya kepada penduduk non-Tionghoa. Lebih lanjut situasi pada saat itu membawa orang Tionghoa dianggap sebagai kambing hitam atas penyebab krisis. Celakanya, situasi ini bukan yang pertama kali terjadi.

Bila menelusuri sejarah Indonesia, komunitas ini sering kali dijadikan bulan-bulanan peristiwa besar. Peristiwa Geger Pecinan tahun 1740 menjadi catatan awal kekerasan terhadap golongan ini. Kala itu orang-orang Tionghoa dijadikan kambing hitam atas krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Batavia pada abad ke-18. Hak mereka dirampas sedangkan harta mereka dijarah. Perlawanan yang mereka buat justru dimanfaatkan oleh VOC untuk membantai 10.000 orang Tionghoa di Batavia.<sup>3</sup> Setelah pembantaian itu, kekerasan terhadap golongan ini tidak berhenti begitu saja. Malahan konflik bersenjata merambah ke wilayah lain, salah satunya yang terbesar terjadi di Jawa Tengah. Di wilayah ini terjadi konflik bersenjata antara aliansi Tionghoa dan Jawa melawan Belanda.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Thomas Stamford Raffles. *History of Java, Vol. I*. (London: John Murray. 1817), hlm. 84.

<sup>2</sup> Leo Suryadinata. "Chinese Politics in Post-Suharto's Indonesia. Beyond the Ethnic Approach?" *Asian Survey*. Vol. 41, no. 3: 502–524 (2001), hlm 506.

<sup>3</sup> Hoeffell, Wolter Robert van. 1840. "Batavia in 1740". *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*. Vol. 3, no 1: 491-492.

<sup>4</sup> Kwee Hui Kian. *The Political Economy of Java's Northeast Coast C. 1740-1800*. (Leiden: Brill, 2006), hlm. 40 & M. C. Ricklefs. "The Crisis Of 1740-1 in Java: The Javanese,

Tujuh puluh satu tahun kemudian etnik Tionghoa menjadi kambing hitam dalam pergolakan di Kesultanan Yogyakarta. Orang-orang Tionghoa sejak awal memang telah mendiami wilayah Yogyakarta bersamaan pendirian ibu kota Kesultanan Yogyakarta, 267 tahun lalu. Pada awalnya mereka bisa hidup harmonis dengan penduduk lain dan menjadi bagian penting bagi roda perekonomian kesultanan. Sebagai pedagang dan saudagar, mereka mencari peluang bisnis baru atau mencari peruntungan di pusat politik baru di Jawa. Setidaknya mereka terlacak telah membangun relasi yang baik sejak era Hamengku Buwono I dan Hamengku Buwono II ketika mereka dipercaya sebagai pemungut pajak, tabib pengobatan dan guru beladiri dengan senjata tongkat bagi pasukan keraton Yogyakarta.<sup>5</sup> Namun, situasi berubah pada awal abad ke-19 tatkala seorang Kapitan Cina bernama Tan Jin Sing memberanikan diri untuk masuk ke ranah politik Keraton Yogyakarta. Ia memasuki ranah politik bersamaan dengan terjadinya gejolak di keraton. Sepak terjangnya selama periode ini memang membawa komunitas Tionghoa semakin disegani, tetapi di sisi lain muncul kecemburuan dari golongan lain. Pasalnya komunitas Tionghoa dijadikan kambing hitam atas krisis yang terjadi selama periode ini. Meskipun Tan Jin Sing berhasil meraih posisi sebagai bupati Tionghoa pertama di Kesultanan Yogyakarta, tetapi ia harus menghabiskan hidupnya dalam keterlantaran budaya dan berbagai stigma lain.<sup>6</sup>

Dalam sejarah Yogyakarta barangkali tidak ada tokoh Tionghoa yang memiliki pengaruh dan karisma sebesar Tan Jin Sing. Sayangnya, tidak banyak kajian sejarah yang mengulas tokoh ini. Carey (1984) dalam *Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java 1755-1825*, menyinggung peran Tan Jin Sing dalam perubahan persepsi terhadap komunitas Tionghoa di Yogyakarta. Sementara Werdoyo (1990) dalam karyanya berjudul *Tan Jin Sing: Dari Kapitan Cina sampai Bupati Yogyakarta*, mengulas biografi tokoh ini. Akan tetapi dalam tulisan Werdoyo, sumber yang dipergunakan tidak cukup jelas, sehingga fakta sejarah di dalamnya dipertanyakan sekaligus menjadi celah untuk dapat ditulis kembali.

Kesempatan ini kemudian dituangkan dalam karya ilmiah, sekaligus menjadi pembeda dengan karya-karya yang sebelumnya. Lebih lanjut dengan demikian, hasil dari penelitian Tan Jin Sing dan Komunitas Tionghoa di Yogyakarta Awal Abad ke-19 dapat mengisi kelengkapan historiografi Indonesia yang bertemakan Komunitas Tionghoa, serta sebagai bahan rujukan dan membuka celah baru bagi penelitian selanjutnya. Pasalnya tidak dapat kita pungkiri bahwa walaupun dilabeli sebagai tokoh kontroversial, peran Tan Jin Sing dalam memperjuangkan golongannya tidak dapat

---

Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura". *Bijdragen Tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 139, no. 2/3, 1983, hlm. 273-274.

<sup>5</sup> Yudi Prasetyo, "Dari Pikulan ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900-1942". Entita: *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 2 No. 1: 66 (2020).

<sup>6</sup> Peter Carey, "Towards the Great Divide: Race, Sexuality, Violence and Colonialism in the Dutch East Indies, from Daendels (1808-1811) to the Java War (1825-1830)". hlm. 31-73 dalam F. A. Noor dan Peter Carey, *Racial Difference and the Colonial Wars of 19th Century Southeast Asia*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021), hlm. 44.

dikesampingkan. Berkat dirinya etnik Tionghoa di Yogyakarta mulai berani masuk ke ranah politik. Keikutsertaan etnik Tionghoa dalam dinamika perpolitikan terus berlanjut dan turut berperan dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa pergerakan-kemerdekaan.

Dari uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh Tan Jin Sing terhadap hubungan komunitas Tionghoa dan Jawa di Kesultanan Yogyakarta. Sementara untuk menguraikan inti permasalahan penelitian tersebut diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1). Bagaimana Tan Jin Sing terjun ke ranah politik Kesultanan Yogyakarta? (2). Apa pengaruhnya terhadap hubungan komunitas Tionghoa dan Jawa? Melalui penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Tan Jin Sing dalam komunitas Tionghoa di Yogyakarta.

## METODE

Metode sejarah digunakan sebagai jalan masuk dalam penelitian ini yang meliputi empat tahap, yakni: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Heuristik merupakan langkah awal kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mencari sumber-sumber, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan topik kajian.

Dalam mengkaji periode ini, Babad Diponegoro dan Babad Sepehi yang diperoleh dari Widia Budaya Keraton Yogyakarta menjadi sumber penting yang digunakan dalam penelitian. Sumber babad tersebut kemudian ditopang oleh sumber dari masa kolonial, baik berupa laporan, artikel, atau buku. Tulisan Frans Gerhardus Valck, seorang pejabat tinggi Belanda yang bertugas di Jawa Tengah bagian selatan, berjudul "*Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjocartasche rijk, sedert dezelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in 1816*", menjadi salah satu sumber kolonial penting dalam tulisan ini. Dalam tulisan tersebut, banyak informasi penting mengenai situasi di Yogyakarta menjelang meletusnya perang melawan pasukan Inggris. Setelah sumber-sumber ditemukan dan diverifikasi, penulis melakukan interpretasi pada data. Pada tahap ini penulis menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggabungkannya berdasarkan kerangka konseptual. Hasil interpretasi lalu disajikan dalam bentuk karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>7</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Komunitas Tionghoa di Kesultanan Yogyakarta

Sejarah komunitas Tionghoa di Yogyakarta dimulai bersamaan dengan berdirinya Kesultanan Yogyakarta pada 1755. Kala itu orang Tionghoa melihat munculnya kekuatan politik baru pasca Perjanjian Giyanti sebagai peluang mendapatkan penghidupan baru. Secara bertahap, sebagian dari mereka pindah dari

---

<sup>7</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 73-83.

bekas pusat Kesultanan Mataram ke wilayah sekitar keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono I menyambut hangat kedatangan orang-orang Tionghoa tersebut dengan memberikan izin untuk tinggal di permukiman dekat keraton.



Gambar 1. Peta Yogyakarta tahun 1833 memperlihatkan kawasan Pecinan dengan tanda huruf J.

Sumber: Koleksi KITLV, *Situatie der Ommestreeken van Djocjakarta*. 1833. No. D E 52, 6. (<http://hdl.handle.net/1887.1/item:817475>)

Seiring berjalannya waktu, sebuah komunitas kecil orang Tionghoa berangsur-angsur berdiri di Ketandan, sebelah Pasar Beringharjo. Penghidupan mereka bergantung pada perdagangan perantara, bidang yang mereka tekuni sebelumnya.<sup>8</sup> Mereka aktif di berbagai sektor bisnis mulai dari pemungut pajak, rentenir, hingga pedagang beras skala besar. Selain sebagai perantara, beberapa orang Tionghoa juga aktif dalam bisnis perjudian, pengrajin (pelukis dan tukang kayu), dan sebagai pengusaha kecil industri rumah tangga.

Walaupun hingga tahun 1808 populasi orang Tionghoa di Yogyakarta hanya sekitar 758 atau 0,36% dari keseluruhan populasi, tetapi Sultan dan bangsawan Jawa menghargai kemampuan mereka dalam perdagangan perantara. Menurut Residen Yogyakarta, John Crawford pemungut pajak Tionghoa dikenal memiliki sifat tegas, cermat, dan tidak suka berkompromi.<sup>9</sup> Oleh karena itu, Sultan dan para bangsawan kerajaan sejak awal mengandalkan orang-orang Tionghoa sebagai pemungut pajak pasar dan gerbang tol yang menjadi penghasilan terbesar kesultanan. Tidak mengherankan bila Sultan memperlakukan pemungut pajak Tionghoa sebagai aset berharga bagi kesultanan.

<sup>8</sup> Andreas Ambrosius Susanto. "Under the Umbrella of the Sultan Accommodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia's New Order." *Disertasi*, Radboud Universiteit Nijmegen, 2008, hlm. 29.

<sup>9</sup> Peter Carey. "Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825." *Indonesia*, no. 37: 1-47 (1984), hlm 43. & Peter Carey, *The Power of Prophecy*. (Leiden: KITLV Press, 2008), hlm. 19.

Walaupun hidup di bawah perlindungan keraton, komunitas Tionghoa secara tidak langsung juga berada di bawah sistem administrasi Belanda. Pemerintah kolonial menunjuk seorang Kapitan Cina dengan peran menjadi kepala masyarakat. Sebagai pemimpin, seorang kapitan diberikan hak untuk mengatur urusan masyarakat. Kapitan juga bertugas sebagai perantara antara pemerintah Belanda dan masyarakat Tionghoa, dengan tugas antara lain menjelaskan peraturan pemerintah dan memungut pendapatan dari masyarakat. Kapitan Cina tidak menerima gaji dan biasanya diangkat berdasarkan kekayaan dan status sosial mereka. Banyak dari mereka berasal dari kalangan pemungut pajak. Kapitan Cina pertama di Yogyakarta adalah seorang pemungut pajak bernama To In yang menjabat antara tahun 1755-1764.<sup>10</sup>

Komunitas Tionghoa di Yogyakarta bisa dikatakan sebagai masyarakat heterogen. Komunitas ini dapat dibagi berdasarkan kelompok bahasa dan daerah asal. Hokkian menjadi kelompok terbesar, disusul oleh Kanton dan Hakka.<sup>11</sup> Sementara secara kultural masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, peranakan dan totok. Meskipun tidak ada kesepakatan terkait penggunaan istilah-istilah ini, tetapi pada umumnya istilah tersebut didasarkan pada garis keturunan dan bisnis yang dijalankan.

Tionghoa totok dipercaya memiliki garis keturunan murni. Kedua orang tuanya berasal dari orang tua Tionghoa, dan masih mempertahankan praktik budaya Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Tionghoa peranakan berasal dari orang tua campuran, hanya salah satu orang tuanya yang mempunyai garis keturunan Tionghoa. Selain itu, mereka juga mempraktikkan budaya yang merupakan hasil percampuran antara budaya Tionghoa dan budaya setempat.<sup>12</sup>

Dalam kegiatan ekonomi, kedua kelompok ini juga sulit untuk menyatu. Masing-masing memiliki spesialisasi bisnis yang ditekuni. Mayoritas Tionghoa peranakan menekuni bisnis perdagangan, seperti membuka toko dan menjual makanan serta tembakau. Sebaliknya, Tionghoa totok khususnya dari Kanton lebih banyak menggeluti bidang industri mebel dan tekstil.<sup>13</sup>

Selain aktif di bidang industri, Tionghoa totok juga dikenal sebagai rentenir ulung. Mereka tidak hanya meminjamkan uang ke rakyat biasa, tetapi terkadang juga bangsawan Jawa. Kebutuhan gaya hidup yang tinggi terkadang menyeret para bangsawan untuk meminjam uang kepada lintah darat.<sup>14</sup> Di satu sisi, profesi ini membuat banyak orang Tionghoa berhasil menjalin relasi dengan keluarga bangsawan keraton. Namun di sisi lain, profesi sebagai rentenir juga membuat mereka

---

<sup>10</sup> Andreas Ambrosius Susanto, Op.Cit., 2008, hlm. 30.

<sup>11</sup> Departement Van Economische Zaken. *Volkstelling 1930*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1931), hlm. 287-304.

<sup>12</sup> Leo Suryadinata. "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese." *Indonesia*. No. 11: 83-94, (1971), hlm. 83.

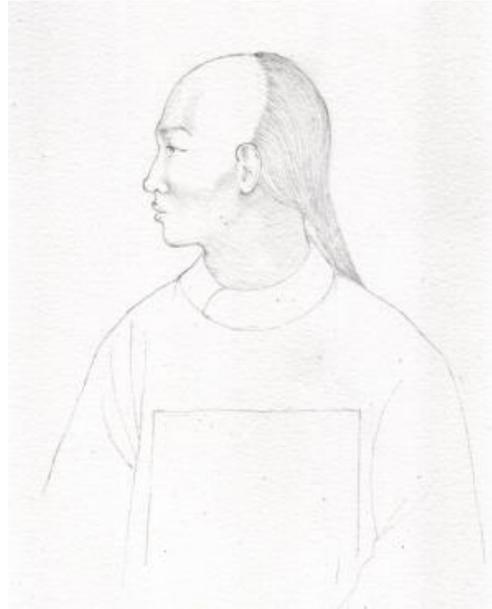
<sup>13</sup> Didi Kwartanada. "Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta between the 1930s and 1945." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 33 no. 2: 257-277 (2002) hlm. 260.

<sup>14</sup> Abdul Wahid. "From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942." *Disertasi*, Universiteit Utrecht, 2013, hlm. 102.

dibenci oleh masyarakat. Bunga kredit tinggi yang dibebankan akhirnya membuat para rentenir Tionghoa mendapat julukan lintah darat.

### **Tan Jin Sing dan Gejolak di Kesultanan**

Tan Jing Sing merupakan Tionghoa peranakan Hokkian yang lahir di Jawa Tengah pada 1770.<sup>15</sup> Seperti kebanyakan orang Tionghoa pada masa itu, ia aktif dalam kegiatan perdagangan. Sebagai keturunan dari Kapitan Cina di Kedu, karier bisnisnya terbilang cemerlang. Namun hal yang menarik dari sosok ini bukanlah kekayaannya, tetapi sepak terjangnya di perpolitikan Kesultanan Yogyakarta.



Gambar 2. Sketsa Tan Jing Sing.

Sumber: Pameran temporer Keraton Yogyakarta bertajuk “Sumakala: Dasawarsa Temaram Yogyakarta” Tahun 2022

Tidak ada catatan yang pasti tentang asal usul Tan Jin Sing. Werdoyo (1990) dalam bukunya menyatakan bahwa kedua orang tua Tan Jin Sing adalah orang Jawa. Setelah ayahnya wafat, ia kemudian diadopsi oleh seorang saudagar dan Kapitan Cina. Sementara Carey (1984) menyebut Tan Jin Sing merupakan Tionghoa peranakan, keturunan dari seorang Kapitan Cina di Kedu. Namun terlepas dari asal-usulnya yang masih abu-abu, tidak dapat dipungkiri kalau Tan Jin Sing muda memiliki privilege untuk mengenyam pendidikan melebihi anak seusianya.

Akses pendidikan yang cukup dan ditopang oleh kecerdasan membuat pikiran Tan Jin Sing pun terasah. Orang Eropa pada zaman itu menggambarkannya sebagai seorang laki-laki cerdas dan terampil yang menunjukkan keterpaduan antara ketajaman seorang Tionghoa, penguasaan pengetahuan lokal, dan kecerdikan orang

---

<sup>15</sup> “Towards the Great Divide: Race, Sexuality, Violence and Colonialism in the Dutch East Indies, from Daendels (1808-1811) to the Java War (1825-1830)”, hlm. 31-73 dalam F. A. Noor dan Peter Carey, *Racial Difference and the Colonial Wars of 19th Century Southeast Asia*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021), hlm. 44.

Jawa. Pandangan ini tidak lepas dari kemampuannya dalam menggunakan berbagai bahasa, di antaranya bahasa Hokkian, Melayu, dan Jawa (kromo dan ngoko). Ia juga mampu menggunakan sedikit bahasa Belanda dan Inggris.<sup>16</sup> Kemampuan bahasanya inilah yang mendukungnya membangun relasi tidak hanya dengan sesama orang Tionghoa, tetapi juga orang Jawa dan Eropa.

Memasuki usia dewasa, Tan Jin Sing mewarisi bisnis dari ayahnya. Di bawah kendalinya, bisnis perdagangan berasnya di Magelang berkembang pesat. Selain mewarisi bisnis, ia juga mewarisi posisi sebagai Kapitan Cina di Kedu (1793-1803). Sebagai seorang kapitan, ia bertugas mengurus perkara komunitas Tionghoa di daerahnya. Posisinya itu kemudian membawa dirinya semakin dikenal banyak orang hingga mengantarkannya menjadi kapitan Cina di Yogyakarta pada 1803-1813. Tidak ada yang menyangka kepindahannya ke Yogyakarta bakal mengubah jalan hidupnya.

Kala itu Yogyakarta diperintah oleh Sri Sultan Hamengku Buwono II atau juga dikenal sebagai Sultan Sepuh, seorang raja yang anti-kolonial. Kebangkrutan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada 31 Mei 1799 membuat Sultan jemawa dan mengira dirinya tak memiliki pesaing yang mampu mengusik kekuasaannya. Bagi Residen Yogyakarta waktu itu, Matthijs Waterloo, Sultan Sepuh adalah sosok yang dikenal menakutkan dan egois. Wataknya ini membuat Pangeran Adipati Anom (Kelak Sri Sultan Hamengku Buwono III) dan Patih Danurejo II segan untuk berbeda pendapat dengan Sultan.<sup>17</sup> Sementara itu, mantan Gubernur Pantai Timur-laut Jawa, Nicolaus Engelhard, menganggap sikap Sultan Sepuh kurang ramah terhadap perwakilan Belanda dan tidak banyak bicara.<sup>18</sup>

Sikap Sri Sultan Hamengku Buwono II ini pada akhirnya menjadi bumerang terhadap dirinya sendiri tatkala berhadapan dengan marsekal bertangan besi Herman Willem Daendels. Sejak berkuasa, Daendels telah menunggu momen yang tepat untuk menjatuhkan Sultan yang dianggapnya sebagai penghalang dan tidak mau diajak bekerja sama. Pemberontakan menantu Sultan Sepuh, Raden Ronggo, pada 20 November-17 Desember 1810 dianggap momentum tepat bagi Gubernur Jenderal Daendels untuk datang ke Yogyakarta dan melengserkan Sultan Sepuh. Sebagai penerusnya Sultan digantikan oleh putra mahkota Raden Mas (R.M.) Surojo yang diberi gelar Wakil Raja.<sup>19</sup>

Realitas yang ada revolusi politik Daendels telah membawa turbulensi hebat bagi Kesultanan Yogyakarta. Pada perkembangannya ternyata R.M. Surojo yang diharapkan mampu menjadi pemimpin baru Kesultanan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Hal ini terjadi karena masih berada di bawah bayang-bayang

---

<sup>16</sup> T. S. Werdoyo, *Tan Jin Sing: Dari Kapitan Cina sampai Bupati*. (Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1990), hlm 3-5 & Peter Carey, *Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. (Jakarta: Komunitas Bambu, 2015), hlm. 63-64.

<sup>17</sup> Peter Carey, 2008, *op.cit.*, hlm. 163.

<sup>18</sup> Poensen, C. "Amangku Buwono II (Sepuh); Ngayogyakarta's tweede sultan" *Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde*, no. 58 1905, hlm. 94.

<sup>19</sup> Mangkudiningrat. *Babad Sepehi/ Babad Mangkudiningratan*. (Yogyakarta: Widia Budaya) Pupuh III.

ayahnya yang masih tinggal di keraton.<sup>20</sup> Situasi ini kemudian memunculkan dua faksi di keraton, yakni kelompok kasepuhan dan karajan. Kedua faksi ini akhirnya saling bertikai satu sama lain yang pada perkembangannya membuat keraton semakin lemah.

Pada akhir kekuasaan Belanda-Prancis situasi justru semakin kacau. Tanpa berkonsultasi dengan pihak kolonial, Sultan Sepuh menyuruh bawahannya mengeksekusi Patih Danurejo II yang dianggap pendukung terbesar putranya. Setelah pendukung terkuatnya tiada posisi R.M. Surojo otomatis berada di ujung tanduk.<sup>21</sup> Lantaran khawatir turut dibunuh, putra mahkota akhirnya meminta bantuan putra sulungnya, Raden Ontowiryo (Diponegoro) dan Kapitan Cina, Tan Jin Sing.

Kedua tokoh ini masing-masing memiliki kelebihan. Ontowiryo dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan bijak, sedangkan Tan Jin Sing dikenal mempunyai kemampuan komunikasi yang baik karena menguasai banyak bahasa. Untuk menghindari pertumpahan darah, Diponegoro menyarankan ayahnya untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada kakeknya. Sultan Sepuh tentu dengan senang hati menerimanya dan menurunkan R.M. Surojo (Sri Sultan Hamengku Buwono III) kembali menjadi putra mahkota. Sementara itu, Tan Jin Sing ditugaskan menjalin komunikasi dengan pihak Inggris.<sup>22</sup>

Tidak banyak perubahan yang terjadi pada periode pemerintahan Inggris di Jawa, Sultan Sepuh tetap memiliki sikap keras menolak campur tangan asing. Hal ini yang kemudian mengarah pada permusuhan dengan Letnan Gubernur Jendral Inggris, Thomas Stamford Raffles. Penolakan ditambah momentum perselisihan dengan R.M. Surojo menjadi pemicu Raffles menjalankan rencananya mengirimkan pasukan untuk menghukum Sultan Sepuh.

Di tengah situasi ketegangan yang terjadi Tan Jin Sing menjalankan perannya. Dalam upaya menjalin kerja sama, Tan Jin Sing bertugas menjadi penerjemah mendampingi Papatih Dalem Kadipaten, Raden Ngabehi Joyosentiko. Sejak 11 April 1812 keduanya aktif berkorespondensi dengan Residen Yogyakarta, John Crawfurd. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, Inggris menjanjikan dukungan kepada R.M. Surojo untuk menduduki takhta. Sementara putra mahkota bersedia menerima syarat apa pun yang diminta Inggris asalkan bisa mendapat solusi dari situasi pelik itu.<sup>23</sup>

Korespondensi tersebut akhirnya menghasilkan perjanjian rahasia 12 Juni 1812 yang ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa. Tan Jin Sing ikut serta dalam proses penulisan naskah perjanjian bahasa Jawa yang berisi kesanggupan Inggris untuk melengserkan Sultan Sepuh dari takhta dan menobatkan R.M. Surojo sebagai raja Kasultanan Yogyakarta. Sebagai imbalannya, Inggris meminta sejumlah ganti rugi

---

<sup>20</sup> Peter Carey, 2008, *op.cit.* hlm. 264.

<sup>21</sup> P.H. van der Kemp. "Diponegoro, eene Geschiedkundige Hamlettype". *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkund*, Vol.46, no. 1, 1896, hlm. 321-322.

<sup>22</sup> Diponegoro. *Babad Diponegoro*. (Yogyakarta: Widia Budaya), pupuh II Asmaradana.

<sup>23</sup> P. J. F. Louw dan E. S. de Klerck. *De Java-oorlog van 1825-1830*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1905), hlm. 107-108.

untuk menutup seluruh biaya ekspedisi Inggris dan kesediaan putra mahkota menjalin kesepakatan kerja sama baru dengan Inggris.<sup>24</sup>

Pasca kesepakatan, rencana yang sudah disusun mulai direalisasikan dengan pengiriman pasukan menuju wilayah Yogyakarta. Pasukan yang dimaksud terdiri dari pasukan India dan Gurkha atau oleh rakyat di Yogyakarta ketika itu disebut sebagai pasukan Sepehi. Akibatnya di Yogyakarta terjadi peristiwa berdarah karena penyerangan bersenjata oleh pasukan Inggris yang disebut "Geger Sepehi". Invasi Inggris pada 19-20 Juni 1812 sekaligus menjadi bukti klimaks dari serangkaian konflik yang terjadi di keraton. Serbuan langsung pasukan Inggris dibawah Kolonel Hugh Robert Rollo Gillespie yang tertuju ke arah Keraton Yogyakarta tidak mampu dihadang oleh perlawanan kesatuan prajurit keraton. Peristiwa ini pun menjadi periode yang sangat kelam bagi Kasultanan Yogyakarta, pasalnya selain kekalahan ternyata juga terjadi penjarahan yang massif terhadap asset Keraton.

Dapat dibayangkan pada waktu itu dalam rangka menjarah, rumah-rumah digeledah dan pintu-pintu didobrak untuk mendapatkan barang berharga serta penting dari lokasi penyimpanannya. Pasukan Inggris berseragam merah bahkan sampai mengeruk parit, menghancurkan lemari, menuruni sumur dan membongkar lantai agar tidak ada harta yang luput dari penjarahan mereka. Namun yang terpenting dari penjarahan yang terjadi perampasan keris dapat diartikan juga sebagai peristiwa perampasan kehormatan. Selain sebagai simbol maskulinitas, keris adalah simbol martabat dan harga diri seorang kesatria Jawa, sehingga perampasan keris sama dengan pengebirian yang dilakukan secara paksa. Artinya, seluruh kekuasaan Sultan Sepuh atas Keraton Yogyakarta telah direngut. Dengan demikian, peristiwa Geger Sepehi baik secara simbolik maupun kasat mata kekuasaan Sultan beralih kepada perampasnya, yaitu penguasa kolonial Inggris.<sup>25</sup>

Setelah tentara Raffles berhasil menduduki Keraton Yogyakarta pada 20 Juni 1812, kemudian dikeluarkan pengumuman bahwa Sultan Sepuh secara resmi diturunkan tahtanya dengan beberapa tuduhan tentang kejahatannya. Pemerintah Inggris memiliki pandangan bahwa akibat dari berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran atas perjanjian (28 Desember 1811) telah menunjukkan bahwa dirinya tidak layak mendapat kepercayaan dan tidak bisa untuk dipercaya dalam melaksanakan pemerintahan yang dilimpahkan kepadanya. Lebih lanjut, selain tuduhan atas kejahatan yang dilakukan, pihak Inggris juga menyampaikan peringatan kepada para pendukungnya (golongan kasepuhan) bahwa barangsiapa yang mendukung Sultan Sepuh untuk kembali memerintah akan dianggap sebagai pengkhianat. Atas perbuatan konsekuensinya akan dihukum sesuai dengan seberapa besar kesalahan yang dilakukan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> T. S. Werdoyo, 2015, *op.cit.*, hlm. 39-41. Lihat Baha Uddin. "Kedudukan dan Relasi Politik Tan Jin Sing Pada Peristiwa Geger Sepehi dalam Babad Panular. Babad Mangkubumi. dan babad Pakualaman". *Patrawidya*, Vol. 23 No.2: 115 (2022).

<sup>25</sup> Arsanti dan Sudibyo Wulandari. *Pengasingan Sultan Hamengku Buwono II di Saparua*. (Yogyakarta: Museum Negeri Sonobudoyo, 2021), hlm. 36.

<sup>26</sup> Peter Carey. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1885, Jilid 2*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 412.

Kedudukan Sultan Sepuh kemudian digantikan oleh putra mahkota R.M. Surojo yang kemudian dilantik oleh Raffles sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono III. Sebagai hukuman atas perbuatannya melawan pemerintah Inggris, Sultan Sepuh kemudian diasingkan. Berbeda dengan peristiwa tahun 1811 ketika diturunkan oleh Deandels, kini Sultan Sepuh harus berangkat ketempat pengasingan di Pulau Penang (1812-1815) seperti diperintahkan oleh Pemerintah Inggris.<sup>27</sup> Dikisahkan pada tanggal 3 Juli 1812, bersamaan dengan kepulangan satuan utama tentara Inggris dengan hasil jarahnya dari keraton, Sultan Sepuh dan kedua putranya, Pangeran Mangkudiningrat dan Pangeran Martosono dibawa ke Semarang dalam proses pengasingan ke Pulau Penang.

Keberhasilan Inggris dan kenaikan tahta R.M. Surojo memperlihatkan peran Tan Jin Sing yang cukup sentral.<sup>28</sup> Selain menjadi perantara, selama berlangsungnya Geger Sepahi ketika kebanyakan orang Tionghoa di Yogyakarta menyingkir dari peristiwa itu, seorang Tan Jin Sing justru menjamin persediaan pangan dan persediaan-persediaan lainnya untuk pasukan Inggris-India.<sup>29</sup> Sumber lain menyebutkan selain menyediakan beras untuk kebutuhan pangan pasukan Inggris, ia juga berinisiatif menyediakan tangga bambu supaya pasukan Inggris bisa dengan mudah menerobos melewati benteng.<sup>30</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri keterlibatan aktif Tan Jin Sing dan komunitas Tionghoa dalam gejolak politik di Yogyakarta pasca keberhasilan serangan yang dilakukan memantik sentimen anti Tionghoa di Yogyakarta. Para bangsawan golongan kasepuhan menuduh Tan Jin Sing sebagai musuh dalam selimut. Sebagai balasan, ia dan Joyosentiko menjadi target penyerangan pada malam perayaan pasca penyerbuan. Kala itu pesta perayaan tengah diseleggarakan di keresidenan, para tamu dihidangkan minuman beralkohol dan opium. Tiba-tiba seorang punakawan Pangeran Mangkudiningrat bernama Gondodiwiryo mengamuk dan mengarahkan tombaknya untuk menusuk Joyosentiko dan Tan Jin Sing.<sup>31</sup> Akibat peristiwa ini nyawa

---

<sup>27</sup> Djoko Marihandono & Harto Juwono. *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*. (Yogyakarta: Banjar Aji Production. 2008), hlm. 169.

<sup>28</sup> Cuplikan teks dalam Babad Sepahi, Naskah A: pupuh III, pada 64-53 menyebutkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono III dan Tan Jing Sing sesungguhnya adalah sahabat lama dan sering membicarakan perihal perebutan kekuasaan dari ayahnya. Yudhi Irawan. *Babad Sepahi: Suntingan Teks dan Aspek Kesejarahan*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018), hlm. 301-302.

<sup>29</sup> Tan Jin Sing memiliki orang kepercayaan bernama Kwee Hwie Kiong dalam menjalankan rencana untuk menyediakan cukup makanan bagi prajurit Inggris selama tiga bulan yang dikerjakan secara rahasia Lihat, Baha Uddin, 2022, *op.cit.*, hlm. 115; Peter Carey. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. (Jakarta: Komunitas Bambu. 2015), hlm. 64 & Soedarsiman Poerwokoesoemo. *Kadipaten Pakualaman*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm. 140.

<sup>30</sup> J. JCz Hageman. "De Engelschen op Java." *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, no. 6, 1857, hlm 424. & Louw, P. J. F. dan E. S. de Klerck, 1905, *op.cit.*, hlm 113.

<sup>31</sup> Mangkudiningrat. *Babad Sepahi/Babad Mangkudiningratan*. (Yogyakarta: Widia Budaya), Pupuh III.

patih kadipaten tidak tertolong, sedangkan kapitan Cina mendapat luka tusukan di tangannya.<sup>32</sup>

### Menjadi Bupati Tionghoa Pertama

Pasca-penyerbuan Inggris (19-20 Juni 1812) dan penobatan R.M. Surojo menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono III, Tan Jin Sing tetap terlibat aktif dalam hiruk pikuk perpolitikan keraton. Ia turut berperan dalam pemilihan patih pengganti Sindunegoro (Danurejo III) yang dianggap Crawford telah udzur. Saat itu Sultan bimbang karena muncul dua kandidat kuat patih baru, yakni Tumenggung Pringgodingrat dan Tumenggung Sumodipuro (Bupati Japan/Mojokerto). Sultan akhirnya mengutus Tan Jin Sing untuk bertanya kepada penasihat politik utamanya, Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Setelah sempat berbincang dengan kapitan Cina itu, Pangeran akhirnya memilih bupati berdarah Bali, Sumodipuro, sebagai patih selanjutnya.<sup>33</sup>

Empat hari pasca penobatan Sumodipuro sebagai Patih Danurejo IV, pada 6 Desember 1813 memasuki babak baru untuk Tan Jin Sing dalam hidupnya. Sebuah kehidupan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Kala itu hampir seluruh pendukung Sri Sultan Hamengku Buwono III mendapat penghargaan, tak terkecuali Tan Jin Sing. Awalnya Inggris menjanjikan ± 1.000 dolar Spanyol pertahun untuk jasanya.<sup>34</sup> Akan tetapi, hadiah yang diterimanya tidak hanya itu, karena Raffles juga mendesak Sultan untuk mengangkat orang kepercayaannya itu sebagai pejabat tinggi keraton. Setelah desakan itu, Tan Jin Sing dinobatkan sebagai Bupati Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Raden Tumenggung Secodiningrat (K.R.T. Secodiningrat).

Pengangkatan inipun menjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, sebab belum pernah ada cerita seorang Tionghoa menduduki jabatan demikian tinggi di lingkungan Keraton Yogyakarta pasca Perjanjian Giyanti. Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono I secara tegas membatasi orang Tionghoa menjalin hubungan yang terlalu dekat dengan keluarga keraton, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan.<sup>35</sup>

Setelah diangkat sebagai bupati ia melepaskan gelarnya sebagai kapitan Cina, posisinya kemudian diisi oleh Que Wi Kong yang juga memiliki hubungan dekat dengannya. Sebagai pejabat tinggi keraton, mantan kapitan Cina itu memperoleh tanah jabatan yang bisa diwariskan. Berdasarkan catatan Rouffaer, Tan Jin Sing memperoleh seluas 800 cacah tanah di Lowanu dan (350 cacah) Bagelen Timur.<sup>36</sup> Wilayah Jono yang merupakan pusat tenun Tionghoa termasuk di dalamnya. Di samping itu, ia juga memperoleh properti berharga di sekitar ibu kota kerajaan,

---

<sup>32</sup> Peter Carey, 2008, *op.cit.*, hlm. 354.

<sup>33</sup> Wolter Robert van Hoeffell. "Batavia in 1740". *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Vol. 3, no.1: 447-557 (1840), hlm 139.

<sup>34</sup> Peter Carey, 2008, *op.cit.*, hlm. 311.

<sup>35</sup> Peter Carey, 2019, *op.cit.*, hlm. 466.

<sup>36</sup> Rouffaer, G. P. 1931. *Vorstenlanden*. (Gravenhage: Martinus Nijhoff. 1931), hlm. 16.

termasuk sebidang tanah di sebelah utara keraton yang disewakan Tan Jin Sing untuk pemukiman Tionghoa.

Setelah menjadi pejabat tinggi keraton, hidup Tan Jin Sing berubah 180 derajat. Kendati kini ia memang memiliki jabatan strategis, tapi di sisi lain banyak pihak yang tidak menyukai pengangkatannya sebagai pejabat keraton. Sebenarnya dirinya membantah bahwa kekuasaan dan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya telah memberikannya keuntungan keuangan secara khusus di luar dari kegiatan perdagangan pribadinya. Namun meskipun demikian, kedekatan Tan Jin Sing dengan pihak Inggris tidak bisa ditutupi, sehingga membuatnya sering dituduh sebagai pemicu berkobarnya kecemburuan sosial penduduk Jawa terhadap komunitas Tionghoa. Kontrak politik 1 Agustus 1812 antara Kesultanan dan Inggris dianggap banyak memberi keistimewaan kepada orang-orang Tionghoa. Kini segala perkara hukum yang menyangkut mereka dilindungi hukum kolonial (Pasal delapan). Selain itu, banyak dari mereka ditugaskan menjadi bandar pemungut cukai setelah Inggris menguasai gerbang cukai dan pasar (Pasal empat).<sup>37</sup>

Kecemburuan sosial mengobarkan sentimen anti Tionghoa di wilayah Kesultanan. Mereka dijadikan kambing hitam atas kekacauan di wilayah Yogyakarta. Pada akhirnya teror mulai menghantui orang-orang Tionghoa. Pembakaran gerbang tol Tionghoa di Prambanan menjadi awal dari teror tersebut. Tatkala Perang Jawa pecah orang-orang Tionghoa tetap menjadi target sasaran. Pada 23 September 1825, pasukan kavaleri kecil yang dipimpin Raden Ayu Yudakusuma (Putri Sultan Hamengku Buwono I) mengubrak-abrik permukiman Tionghoa di Ngawi. Pasukan itu tidak hanya membunuh penduduk sipil, tetapi juga memutilasi mereka (Carey 1984). Sementara di Bagelen Timur, penduduk setempat mendesak orang-orang Tionghoa untuk berhenti sebagai pemungut pajak.<sup>38</sup>

Pada saat bersamaan komunitas Tionghoa mulai menjaga jarak dengan Tan Jin Sing. Ia dianggap arogan lantaran mengabaikan adat Tionghoa. Perpindahan agamanya ke Islam menjadi awal kontroversinya.<sup>39</sup> Belum ditambah gaya hidupnya yang dibuat seolah-olah adalah keturunan bangsawan Jawa. Para utusan keraton yang datang ke rumahnya dipaksa melakukan sembah. Sementara istri keduanya yang berasal dari kalangan biasa didandani sedemikian rupa layaknya putri bangsawan dan diberi gelar Raden Ayu. Di rumahnya ia menempatkan penari Bedhaya wanita untuk menghibur para tamunya. Tidak hanya itu, ketika acara keraton berlangsung ia juga duduk di kursi yang sejajar dengan para pangeran senior.<sup>40</sup>

Pasca wafatnya Sri Sultan Hamengku Buwono III pada 3 November 1814 dan kembalinya kekuasaan Belanda pada 1816, posisi Tan Jin Sing di lingkungan keraton

---

<sup>37</sup> Pieter Willem Filet. *De verhouding der vorsten op Java tot de Ned-Indische regeering.* 's (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1895), hlm. 267.

<sup>38</sup> P. J. F. Louw dan E. S. de Klerck. 1905, *op.cit.*, hlm. 433.

<sup>39</sup> F. G. Valck. "Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjocartasche rijk, sedert dezelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in 1816." *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Vol. 6 no. 3, 1844, hlm. 44.

<sup>40</sup> Peter Carey. "Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825." *Indonesia*, no. 37: 1-47, 1984, hlm. 29.

mulai goyah. Dalam periode peralihan, Crawford sempat berusaha mengenalkan Tan Jin Sing kepada penggantinya Nahuys van Burg pada Agustus 1816. Ia mengatakan bila Nahuys membutuhkan informan dan penasihat berpengalaman serta bisa diandalkan, Tan Jin Sing merupakan orang yang paling tepat. Selain cerdas, ia juga dianggap loyal pada Eropa, sehingga keberadaannya bisa sangat membantu residen baru Yogyakarta tersebut.<sup>41</sup>

Akan tetapi kondisi perpolitikan pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono IV sama sekali tidak menguntungkan mantan kapitan Cina itu. Pakualam I yang ditunjuk sebagai wali dari Sultan Keempat sudah pasti tidak ingin melibatkan Tan Jin Sing dalam urusan keraton, apalagi dalam pengambilan keputusan penting. Sementara itu, Nahuys yang diharapkan tetap melibatkannya dalam urusan politik justru hanya memanfaatkannya sebagai informan. Salah satunya saat ia ditugaskan sebagai komisioner pantai Kalimantan (21 November 1818-5 Mei 1819). Kala itu ada masalah dengan para penambang Tionghoa di daerah itu, untuk mengatasi masalah tersebut Nahuys mengajak Tan Jin Sing sebagai pendampinginya.<sup>42</sup>

Tan Jin Sing sadar kalau posisinya kini tidaklah sekuat dulu. Di keraton, ia hanya mendapat dukungan dari Ibu Sultan Keempat (Ratu Ibu) yang merasa berhutang budi padanya atas bantuan Tan Jin Sing dalam mendapatkan tahta untuk suaminya. Selain itu otomatis tidak ada dukungan lain terhadapnya. Melihat realitas ini, ia memutuskan bersikap netral dan berhati-hati.<sup>43</sup> Meskipun keraton kala itu dipenuhi oleh intrik kekuasaan, tetapi ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Akhirnya mantan kapitan Cina itu pun menghabiskan hidupnya terkatung-katung di antara tiga budaya, Cina, Eropa, dan Jawa. Kisah hidupnya dirangkum dalam sebuah lirik, *Cina wurung, Londo durung, Jawa tanggung*.<sup>44</sup>

Pada periode selanjutnya, setelah pemerintah Belanda kembali pada 1816, Tan Jin Sing disarankan untuk melepaskan tanah *apanage* nya yang amat luas di Lowanu dan kembali ke komunitas Tionghoa dengan nama lama dengan pangkat "Mayor". Namun hal ini menjadi sangat sulit ketika melihat situasi bahwa dirinya sudah terlanjur dibenci dari berbagai kalangan masyarakat.<sup>45</sup> Satu kemungkinan solusi kebuntuan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan asimilasi atau disamakan dengan kelompok masyarakat Eropa melalui suatu keputusan resmi yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal. Langkah tersebut bisa menjadi alternatif, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa pada masa-masa lebih awal dari zaman pemerintahan kolonial di Jawa jalan yang demikian itu tidaklah mudah didapatkan.

---

<sup>41</sup> Peter Carey, 2008, *op.cit.*, hlm. 400.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 401.

<sup>43</sup> F. G. Valck. "Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjocartasche rijk, sedert dezelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschen-bestuur in 1816." *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Vol. 6 no. 3, 1844, hlm. 147.

<sup>44</sup> J. Meinsma. "Een anachronisme," *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, no. 23, 1876, hlm. 133.

<sup>45</sup> Peter Carey, *Inggris di Jawa*. (Jakarta: Kompas, 2017), hlm. 31.

Terbukti bahwa nasib tidak berpihak baik kepada Tan Jin Sing bersama keluarga peranakannya yang harus hidup dalam satu keterlantaran budaya. Situasi yang berat ini pada akhir Perang Jawa membuat dirinya terpaksa harus menjual kembali sebagian besar tanah-tanah yang diperolehnya kepada Sultan agar dapat melunasi utang-utangnya. Akhirnya, pada 10 Mei 1831, ia meninggal dengan mewarisi gelar yang dimilikinya kepada putranya. Akan tetapi, putranya meninggal pada tahun 1857 dan tidak meninggalkan seorang ahli waris yang sah. Oleh karena itu, tanah yang tersisa kembali lagi ke tangan Sri Sultan Hamengku Buwono VI, berdasarkan sebuah akta notaris yang dibuat tanggal 24 April 1861.<sup>46</sup> Dalam situasi ini keturunannya pun “dilunasi” oleh Keraton Yogyakarta dengan cara diasimilasi kembali ke dalam komunitas Tionghoa pada pertengahan abad ke-19.<sup>47</sup> Saat itu keluarga Tan Jin Sing akhirnya dapat berasimilasi kembali ke dalam kelompok masyarakat Tionghoa Yogyakarta. Lokasi bekas kediamannya pun hingga sekarang masih kita jumpai di kompleks Kampung Ketandan, sebagai pusat niaga serta budaya Tionghoa di Yogyakarta di mana rumah atau kantor Tan Jin Sing berada.<sup>48</sup>

## **SIMPULAN**

Yogyakarta awal abad ke-19 merupakan periode penuh gejolak politik. Pada periode inilah kapitan Cina bernama Tan Jin Sing hidup. Pada awalnya ia hanyalah seorang pebisnis biasa, tetapi kemelut yang terjadi di keraton akhirnya memaksanya untuk ikut terjun ke dalam pusaran politik. Keterlibatan Tan Jin Sing yang notabene adalah seorang Tionghoa peranakan di dalam politik adalah yang pertama dalam sejarah Kesultanan Yogyakarta.

Tidak bisa dipungkiri dalam periode ini nampak banyak dihiasi dengan konflik antara Sultan Sepuh dengan putra mahkota R.M. Surojo. Tokoh Tan Jin Sing pun lebih condong bergabung ke dalam kubu putra mahkota. Kemampuan komunikasi dan berbahasa membuat dirinya didapuk menjadi negosiator dan penerjemah bagi putra mahkota. Selama negosiasi rahasia antara putra mahkota dan Inggris, ia benar-benar terlibat aktif di dalamnya. Bahkan tatkala Inggris menyerbu Yogyakarta, dirinya turut membantu kebutuhan pangan bagi kekuatan kolonial itu.

Pasca Geger Sepahi Tan Jin Sing dianugerahi posisi sebagai bupati dengan gelar K.R.T. Secodiningrat. Ia menjadi orang Tionghoa pertama yang memperoleh gelar itu. Namun keterlibatannya di dalam perpolitikan keraton harus dibayar mahal. Dirinya harus menghadapi keterlantaran budaya, karena dijauhi komunitas Tionghoa dan para bangsawan keraton. Stigma sebagai pengkhianat dan mata-mata kolonial terus melekat hingga akhir hidupnya. Ditambah perannya dalam menggerakkan komunitas Tionghoa untuk terlibat dalam gejolak di keraton ternyata memicu munculnya sentimen anti-Tionghoa di Yogyakarta.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

<sup>48</sup> Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanpa tahun. “Sri Sultan Hamengku Buwono III.” Diunduh 7 Januari 2023. Yogyakarta: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (<https://www.kratonjogja.id/raja-raja/4-sri-sultan-hamengku-buwono-iii/>).

## DAFTAR PUSTAKA

- Carey, Peter. "Changing Javanese Perceptions of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825." *Indonesia*, no. 37: 1-47 (1984).
- \_\_\_\_\_. *Orang Cina, Bandar Tol, Candu, & Perang Jawa: Perubahan Persepsi Tentang Cina 1755-1825*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Inggris di Jawa*. Jakarta: Kompas, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-18855, Jilid 2*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- \_\_\_\_\_. "Towards the Great Divide: Race, Sexuality, Violence and Colonialism in the Dutch East Indies, from Daendels (1808-1811) to the Java War (1825-1830)." Hlm. 31-73 dalam *Racial Difference and the Colonial Wars of 19th Century Southeast Asia, disunting oleh F. A. Noor dan P. Carey*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2021.
- \_\_\_\_\_. *The Power of Prophecy*. Leiden: KITLV Press, 2008.
- Departement Van Economische Zaken. *Volkstelling 1930*. Batavia: Landsdrukkerij, 1931.
- Diponegoro. *Babad Diponegoro*. Widia Budaya, Yogyakarta.
- Filet, Pieter Willem. *De verhouding der vorsten op Java tot de Ned-Indische regeering*. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff (1895).
- Hageman, J. JCz. "De Engelschen op Java." *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, no. 6 (1857).
- Hoevell, Wolter Robert van. "Batavia in 1740". *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Vol. 3, no. 1: 447-557 (1840).
- \_\_\_\_\_. "Bijdrage tot de geschiedenis van de Vorstenlanden op Java." *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*. no, 23 (1861).
- Irawan, Yudhi. *Fakta Sejarah Pakualaman: Seri Naskah Kuno No. 99*. Jakarta: Perpusnas, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Babad Sepehi: Suntingan Teks dan Aspek Kesejarahan*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018.
- Kemp, P.H. van der. "Dipanegara, eene Geschiedkundige Hamlettype". *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkund*, Vol.46, no. 1 (1896).
- Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanpa tahun. "Sri Sultan Hamengku Buwono III." Diunduh 7 Januari 2023. Yogyakarta: Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (<https://www.kratonjogja.id/raja-raja/4-sri-sultan-hamengku-buwono-iii/>).
- Kian, Kwee Hui. *The Political Economy of Java's Northeast Coast C. 1740-1800*. Leiden: Brill, 2006.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Kwartanada, Didi. "Competition, Patriotism and Collaboration: The Chinese Businessmen of Yogyakarta between the 1930s and 1945." *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 33 no. 2: 257-277 (2002). Diunduh 9 Desember, 2022 ([http://journals.cambridge.org/abstract\\_S0022463402000139](http://journals.cambridge.org/abstract_S0022463402000139)).

- Mangkudiningrat. Babad Sepehi/Babad Mangkudiningratan. Yogyakarta: Widia Budaya Keraton Yogyakarta.
- Lohanda, Mona. The Kapitan Cina of Batavia 1837-1942. Inggris: ProQuest, 1994.
- Louw, P. J. F. dan E. S. de Klerck. *De Java-oorlog van 1825-1830*. Batavia: Landsdrukkerij, 1905.
- Marihandono, Djoko & Harto Juwono. *Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: Banjar Aji Production, 2008.
- Meinsma, J.. "Een anachronisme," *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde*, no. 23 (1876).
- Poensen, C. "Amangku Buwono II (Sepuh); Ngayogyakarta's tweede sultan" *Bijdragen tot de Taal-, Landen Volkenkunde*, no. 58 (1905).
- Poerwokoesoemo, Soedarsiman. *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Prasetyo, Yudi. "Dari Pikulan ke Kelontong: Tionghoa dan Toko Kelontong Yogyakarta 1900-1942". Entita: *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 2 No. 1: 64-78 (2020).
- Raffles, Thomas Stamford. *History of Java, Vol. I*. London: John Murray, 1817.
- Ricklefs, M. C. *Soul Catcher: Java's Fiery Prince Mangkunagara I, 1726-1795*. Singapore: NUS Press, 2018.
- \_\_\_\_\_. "The Crisis Of 1740-1 in Java: The Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the Fall of the Court of Kartasura." *Bijdragen Tot de Taal-, Land-en Volkenkunde*, Vol. 139, no. 2/3, (1983). Diunduh 2 Desember, 2022 (<https://www.jstor.org/stable/27863505>).
- Rouffaer, G. P. *Vorstenlanden*. Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1931.
- Suryadinata, Leo. "Chinese Politics in Post-Suharto's Indonesia. Beyond the Ethnic Approach?" *Asian Survey*. Vol. 41, No. 3: 502-524 (2001). Diunduh 7 Januari, 2023 (<http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2001.41.3.502>).
- Suryadinata, Leo. "Pre-War Indonesian Nationalism and the Peranakan Chinese." *Indonesia*. No. 11: 83-94 (1971). Diunduh 7 Januari, 2023 (<http://www.jstor.org/stable/3350745>).
- Susanto, Andreas Ambrosius. "Under the Umbrella of the Sultan Accommodation of the Chinese in Yogyakarta During Indonesia's New Order." *Disertasi*, Radboud Universiteit Nijmegen, 2008. Diunduh 1 Januari, 2023 (<http://hdl.handle.net/2066/73402>).
- Uddin, Baha. "Kedudukan dan Relasi Politik Tan Jin Sing Pada Peristiwa Geger Sepehi dalam Babad Panular, Babad Mangkubumi, dan babad Pakualaman". *Patrawidya*, Vol. 23 No.2: 97-120 (2022).
- Valck, F. G. "Overzicht van de voornaamste gebeurtenissen in het Djocjocartasche rijk, sedert dezelfs stichting (1755) tot aan het einde van het Engelsche tusschenbestuur in 1816." *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Vol. 6 No. 3 (1844).
- Wahid, Abdul. "From Revenue Farming to State Monopoly: The Political Economy of Taxation in Colonial Indonesia, Java c. 1816-1942." *Disertasi*, Universiteit Utrecht, 2013.

- Werdayo, T. S. *Tan Jin Sing: Dari Kapitan Cina sampai Bupati*. Yogyakarta. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1990.
- Winter, J. W. dan G.P Rouffer. "Beknopte beschrijving van het hof Soerakarta in 1824". *Bijdragen Tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Vol. 54, No. 1/2: 15-172 (1902).
- Wulandari, Arsanti dan Sudiby. *Pengasingan Sultan Hamengku Buwono II di Saparua*. Yogyakarta: Museum Negeri Sonobudoyo, 2021.